

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Analisis Proses *Collaborative Governance* dalam Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga dapat disimpulkan bahwa proses collaborative governance dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga belum berjalan optimal. Kondisi tersebut tercermin dari belum terpenuhinya secara menyeluruh tahapan-tahapan proses *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) dan faktor yang mempengaruhi kolaborasi menurut Manttessich & Monsey (1992).

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah ketidaktegasan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan peran fasilitatif dan koordinatif, khususnya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Pemerintah daerah belum secara optimal mendorong pembentukan Forum CSR serta belum menyediakan mekanisme yang jelas untuk mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan program CSR oleh badan usaha dengan prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, ditemukan adanya kegagalan komunikasi dan koordinasi antara pihak eksekutif, yaitu Pemerintah Daerah, dengan pihak legislatif, yaitu DPRD

Kabupaten Purbalingga, dalam pengelolaan dan pengawasan program CSR. Lemahnya komunikasi antar lembaga tersebut menyebabkan belum adanya kesepahaman bersama terkait arah kebijakan, peran kelembagaan, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan CSR. Kondisi ini berdampak pada minimnya dukungan politik dan kelembagaan dalam mendorong optimalisasi tata kelola kolaboratif CSR di Kabupaten Purbalingga.

Di sisi lain, komunikasi antar aktor yang terlibat belum berlangsung secara optimal, terbuka, dan berkelanjutan. Minimnya ruang dialog formal dan forum komunikasi yang inklusif atau Forum CSR menyebabkan proses pertukaran informasi, penyampaian aspirasi masyarakat, serta penyelarasan program CSR tidak berjalan secara sistematis. Komunikasi yang masih bersifat informal dan insidental turut menghambat proses pembangunan kepercayaan dan konsistensi kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Faktor penghambat lainnya adalah adanya perbedaan kepentingan antar aktor dalam pelaksanaan program CSR. Pemerintah daerah cenderung berorientasi pada pencapaian target pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, sementara sebagian badan usaha masih memandang CSR sebagai kewajiban administratif atau kegiatan filantropi semata. Perbedaan kepentingan tersebut belum dikelola secara efektif melalui mekanisme kolaboratif, sehingga menyulitkan terciptanya pemahaman bersama dan komitmen jangka panjang. Secara keseluruhan, belum optimalnya proses *collaborative governance* dalam program CSR di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR

masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem tata kelola pembangunan daerah yang kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal tentang Proses *Collaborative Governance* dalam Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga , sebagai berikut :

1. Dialog tatap muka dalam proses *collaborative governance* pembentukan Forum CSR di Kabupaten Purbalingga belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat mekanisme dialog tatap muka melalui pertemuan yang lebih terstruktur, terjadwal, dan melibatkan seluruh aktor kunci seperti pemerintah daerah, DPRD, dan sektor swasta. Selain itu, perlu adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas dari setiap pertemuan agar tercipta kesepahaman bersama mengenai peran, mekanisme, dan pengelolaan Forum CSR.
2. Membangun kepercayaan dalam proses *collaborative governance* pada pelaksanaan Program CSR di Kabupaten Purbalingga belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penulis memberikan saran agar pemerintah daerah memperkuat komunikasi yang lebih terbuka, terstruktur, dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan DPRD. Selain itu, diperlukan kejelasan peran serta pelibatan seluruh aktor kunci secara aktif dalam setiap proses koordinasi dan pengambilan keputusan, sehingga dapat membangun

kepercayaan antaraktor dan mendorong kolaborasi CSR yang lebih efektif di Kabupaten Purbalingga.

3. Komitmen terhadap proses dalam *collaborative governance* pada pembentukan Forum CSR di Kabupaten Purbalingga belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penulis memberikan saran agar pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, DPRD, dan sektor swasta melalui pertemuan yang terjadwal serta mekanisme tindak lanjut yang jelas. Selain itu, seluruh aktor perlu dilibatkan secara aktif dan setara dalam setiap tahapan proses pembentukan Forum CSR, sehingga komitmen yang telah muncul dapat diwujudkan dalam kolaborasi yang lebih terstruktur, terlembaga, dan berkelanjutan.
4. Pemahaman bersama dalam proses *collaborative governance* pada pembentukan Forum CSR di Kabupaten Purbalingga belum terbentuk secara optimal. Oleh karena itu, penulis memberikan saran agar pemerintah daerah memfasilitasi proses penyamaan persepsi melalui forum diskusi atau pertemuan yang melibatkan seluruh aktor secara inklusif. Selain itu, perlu dilakukan perumusan visi, misi, tujuan, serta arah strategis Forum CSR secara bersama-sama agar seluruh aktor memiliki pemahaman yang sama mengenai peran dan fungsi forum.
5. Hasil sementara dalam proses *collaborative governance* pada pelaksanaan Program CSR di Kabupaten Purbalingga belum berjalan secara optimal dan masih berada pada tahap awal. Oleh karena itu, penulis memberikan saran agar pemerintah daerah memperkuat langkah-langkah strategis untuk

menindaklanjuti capaian awal yang telah terbentuk, khususnya melalui percepatan pembentukan Forum CSR sebagai wadah koordinasi resmi antaraktor. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperjelas mekanisme kerja, pembagian peran, serta arah program CSR yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.